

**TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI MINYAK BUMI  
TANPA KONTRAK KERJA SAMA DI KABUPATEN BATANG HARI**

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Batang Hari)



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada  
Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Ismansyah S.H., M.H.

Dr. Nani Mulyati S.H., M.CL.

Oleh:

M. Nanda Setiawan S.H

1820112071

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI  
MINYAK BUMI TANPA KONTRAK KERJA SAMA  
DI KABUPATEN BATANG HARI  
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Batang Hari)**

**M. Nanda Setiawan, Nim 1820112071, Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 156 Halaman.**

**Abstrak**

Minyak bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak. Salah satu permasalahan yang timbul dari pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia yaitu mengenai eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama, yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Batang Hari tepatnya di Desa Pompa Air dan Desa Bungku dengan cara melakukan pengeboran sumur kemudian mengambil minyak yang terkandung dalam sumur tersebut atau dapat disebut dengan *Illegal Drilling*, terdapat kurang lebih 2000 titik sumur minyak bumi tanpa kontrak kerja sama. Hal ini jelas merupakan suatu tindak pidana menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Jenis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian yang penulis lakukan bersifat Deskriptif Analitis, pengumpulan data penelitian dengan cara wawancara dan studi dokumen, Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama di Kabupaten Batang Hari oleh penyidik Kepolisian Resor Batang Hari dilakukan dengan tindakan penegakan hukum preventif dan tindakan penegakan hukum represif penegakan hukum yang dilakukan penyidik polres Batang Hari cukup efektif menurunkan kasus setiap tahunnya, Kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama di Kabupaten Batang Hari oleh penyidik Kepolisian Resor Batang Hari yaitu keterbatasan sumber daya penyidik, lokasi sumur-sumur minyak bumi ilegal yang sulit dijangkau, pelaku melarikan diri, tidak ada koordinasi penyidik PPNS, keterlibatan oknum, masyarakat itu sendiri. Upaya dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama di mengatasi kendala Kabupaten Batang Hari oleh penyidik Kepolisian Resor Batang Hari menambah personil, melakukan sosialisasi, melakukan kerja sama dengan instansi lainnya, melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang dijadikan praktik pengeboran sumur minyak bumi ilegal.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Eksploitasi, Minyak Bumi; Tanpa Kontrak Kerja Sama.**

**LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL OFFENDER EXPLOITATION  
PETROLEUM WITHOUT THE COOPERATION CONTRACT  
IN BATANG HARI DISTRICT  
(Batang Hari Resort Police Case Study)**

**M. Nanda Setiawan, Nim 1820112071, Program Study Master Of Law Postgraduate  
Faculty Of Law Andalas University, 2020, 156 Pages.**

**Abstract**

Petroleum is a strategic non-renewable natural resource controlled by the state and is a vital commodity that controls the livelihoods of many people and has an important role in the national economy so that its management must be able to provide maximum prosperity and welfare to the people. Natural resource management is the right of the state to manage and control it which will be used for the interests and prosperity of many people. One of the problems arising from oil and gas mining in Indonesia is the exploitation of petroleum without a cooperation contract, which is carried out by the community in Batang Hari District, exactly in the Village of Pompa Air and the Village of Bungku by drilling wells and then taking the petroleum contained in these wells or can be called Illegal Drilling, there are approximately 2000 points of oil wells without the cooperation contract. This is clearly a criminal offense according to Article 52 of Law Number 22 Year 2001 Concerning Oil and Gas that is every person who conducts Exploration and / or Exploitation without having a Cooperation Contract as referred to in Article 11 paragraph (1) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 6 (six) years and a maximum fine of Rp. 60,000,000,000.00 (sixty billion rupiah). Type of this research is juridical empirical, research by the author is descriptive analytical, research data collection by way of interviews and document research, data analysis was conducted by means of qualitative. Based on the results of research and discussion can be concluded. Law enforcement against petroleum exploitation offenses without cooperation contracts in Batang Hari District by Batang Hari District Police investigators is carried out with preventive law enforcement actions and repressive law enforcement actions carried out by Batang Hari police investigators quite effectively decreasing cases each year. Obstacles encountered in law enforcement against petroleum exploitation without cooperation contracts in Batang Hari District by Batang Hari Police investigators namely limited resources of police investigators, locations of illegal petroleum wells that are difficult to reach, perpetrators of escape, there is no PPNS investigator coordination, involvement of elements, community legal culture. Efforts in law enforcement against petroleum exploitation without cooperation contracts in overcoming the obstacles of Batang Hari District by Batang Hari Police investigators: adding personnel, conducting socialization, cooperating with other agencies, mapping the locations used as oil well drilling practices illegal.

**Keywords: Law enforcement, Criminal Offender, Exploitation, Petroleum, Without the Cooperation Contract.**